



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	50
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	70
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	70

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80% 80% 80%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif 8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	65% 98% 80% 80% 15% 28% 67% 30 orang
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	70% 60%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
4.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga 2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara 3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	50% 60% 30%
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat 2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi 3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar 4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	75% 100% 80% 80%
6.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan 2. Persentase pencegahan gangguan kamtib 3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80% 70% 80% 70%
7.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80% 70% 80% 70%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 772.182.000
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 772.182.000

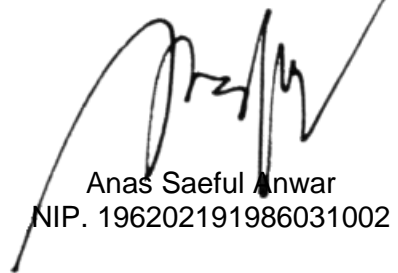
Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan



Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002